YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v5i5.7027

TATA KELOLA PUSAT KULINER PANTAI PADANG: STUDI ATAS PERAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN FASILITAS PUBLIK

Governance of Padang Beach Culinary Center: A Study on the Role of Government in Public Facility Management

Muhammad Thufeil Arabbi & Yuliarti
Universitas Negeri Padang
taufilarabbi@gmail.com; yuliarti@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 25, 2025	Jul 19, 2025	Jul 31, 2025	Aug 5, 2025

Abstract

This study is motivated by the suboptimal utilization of culinary areas following the relocation of street vendors (*PKL*), limited public facilities, and weak enforcement of existing policies. The aim of this research is to analyze the governance of the Pantai Padang Culinary Center by the Padang City Tourism Office in supporting the availability of proper public facilities for both residents and visitors. A descriptive qualitative approach was employed, involving nine informants representing government officials, vendors, and visitors. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed using the interactive model by Miles and Huberman, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that while the area's governance has shown adequate planning supported by regulations and the provision of basic facilities, the organizational process remains suboptimal, and supervision is limited to administrative procedures without a continuous monitoring system. Supporting factors include government policy, initial facility provision, and entrepreneurship training. However, challenges persist, such as

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

vendor resistance, limited supporting infrastructure, and weak field supervision. The study concludes that the governance of the Pantai Padang Culinary Center is not yet fully effective and requires strengthening in implementation and oversight. These findings are expected to serve as a foundation for formulating participatory, adaptive, and sustainable policies for culinary area management.

Keywords: Governance; Culinary Center; Public Facilities; Street Vendor Relocation; Padang City Tourism

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pemanfaatan kawasan kuliner pascarelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL), keterbatasan fasilitas publik, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah dirancang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tata kelola Pusat Kuliner Pantai Padang oleh Dinas Pariwisata Kota Padang dalam mendukung tersedianya fasilitas umum yang layak bagi masyarakat dan pengunjung. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sembilan informan yang terdiri dari unsur pemerintah, pedagang, dan pengunjung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kawasan telah memiliki arah perencanaan yang cukup baik dengan dukungan regulasi serta penyediaan fasilitas dasar. Namun, proses pengorganisasian belum optimal, dan pengawasan masih bersifat administratif tanpa sistem pemantauan berkelanjutan. Faktor pendukung meliputi kebijakan pemerintah, penyediaan fasilitas awal, dan pelatihan kewirausahaan, sementara kendala yang dihadapi mencakup resistensi pedagang, keterbatasan sarana penunjang, serta lemahnya pengawasan lapangan. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa tata kelola Pusat Kuliner Pantai Padang belum efektif secara menyeluruh dan memerlukan penguatan pada aspek implementasi dan pengawasan. Implikasi dari temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pengelolaan kawasan kuliner yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Tata Kelola; Pusat Kuliner; Fasilitas Publik; Relokasi PKL; Wisata Kota Padang

PENDAHULUAN

Menurut (Spillane et al., 2019), pariwisata merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan regional. Sebagai industri multisektoral, pariwisata tidak hanya berkontribusi dalam peningkatan pendapatan lokal, tetapi juga memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat local (UNWTO, 2023). Kehadiran sektor pariwisata turut menjadi katalisator berkembangnya berbagai sektor ekonomi lainnya seperti transportasi, penginapan, perhotelan, dan industri kreatif, sehingga menciptakan dampak berlipat ganda yang signifikan terhadap perekonomian (Cooper dkk., 2023) dalam (Wilopo & Hakim, 2017)

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan regional. Pengembangan kelembagaan ekonomi melalui kelompok usaha dan Badan Usaha Milik Desa telah menjadi fondasi perekonomian di tingkat regional, perkotaan, dan nasional. (Sulaiman et al., 2022) Kegiatan usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peranan krusial dalam perekonomian nasional maupun daerah (Putu Hari Kurniawan, 2019). Selain berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Perkembangan tren pariwisata dewasa ini yaitu wisata kuliner (Saeroji & Wijaya, 2017) sektor ini juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu destinasi wisata utama di Kota Padang adalah Pantai Padang yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, termasuk melalui penataan kawasan kuliner. Sebagai upaya penataan kawasan wisata tersebut, Pemerintah Kota Padang melakukan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Pusat Kuliner Pantai Padang yang berlokasi di sekitar Jembatan Cimpago.

Dalam konteks tata kelola destinasi wisata, (Ramadhan et al., 2025) menegaskan bahwa pengelolaan yang baik sangat menentukan keberhasilan pembangunan pariwisata (Mahendra & Kemala, 2023) menambahkan bahwa faktor utama yang menentukan daya saing suatu kawasan wisata terletak pada ketersediaan fasilitas umum dan pengaturan yang efisien. Pemerintah Kota Padang melakukan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Pusat Kuliner Pantai Padang yang berlokasi di sekitar Jembatan Cimpago. Namun, kebijakan ini belum berjalan optimal. Banyak pedagang yang enggan menempati lokasi baru karena minimnya fasilitas pendukung dan rendahnya jumlah pengunjung. Kondisi ini menunjukkan lemahnya tata kelola dan implementasi kebijakan di lapangan.

Penelitian ini menggunakan teori pengelolaan yang dikemukakan oleh (Lloyd & Aho, 2020), yang terdiri dari empat fungsi utama, yaitu: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (directing), dan pengawasan (controlling). Selain itu, konsep tata kelola menurut (Asaduzzaman, 2025) dan (Kaufmann et al., 1999) akan digunakan untuk menganalisis bagaimana keputusan publik diterapkan dan dijalankan, serta sejauh mana proses tersebut mencerminkan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi.

Penelitian sebelumnya yang relevan antara lain dilakukan oleh (Said et al., 2023), tentang tata kelola wisata bahari Sulawesi Barat, (Fadhila et al., 2023) tentang pemanfaatan ruang publik di Padang Panjang, serta (Rizqi Ayu Maharani, 2022) tentang strategi

pengembangan wisata kuliner di Lombok Barat. Selain itu, (Akbar & Pangestuti, 2017) meneliti peran kuliner dalam membentuk citra destinasi di Bromo Tengger Semeru, dan (Seharja & Md, 2021) mengangkat strategi pengembangan kawasan pantai berbasis 3A (atraksi, amenitas, aksesibilitas). Namun penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengangkat isu pengelolaan pusat kuliner berbasis pantai sebagai kebijakan daerah, terutama yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji tata kelola pusat kuliner sebagai bagian dari destinasi wisata perkotaan dengan fokus pada implementasi kebijakan publik daerah, efektivitas pengelolaan fasilitas, serta respon masyarakat dan pelaku usaha lokal. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menerangi tata kelola pusat kuliner Pantai Padang dalam konteks pariwisata perkotaan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap praktik tata kelola berbasis partisipasi pelaku usaha lokal dalam ruang wisata publik perkotaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tata kelola pusat kuliner Pantai Padang dalam mendukung pengembangan destinasi wisata berbasis kuliner serta Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam mengelola pusat kuliner Pantai Padang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial yang sistematis, mendalam, dan akurat yang diteliti, yaitu tata kelola Pusat Kuliner Pantai Padang dalam meningkatkan aksesibilitas fasilitas publik. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga April 2025 di Kota Padang, dengan fokus pada Dinas Pariwisata Kota Padang sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pusat kuliner tersebut. Menurut (Lexy J Moleong, 2019), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami perilaku, persepsi, dan tindakan subjek secara holistik dalam konteks yang alami. Fokus penelitian ini diarahkan pada pelaksanaan tata kelola oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, yang dalam praktiknya masih menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pedagang dan masyarakat. Teknik penentuan informan dilakukan melalui purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2021). Jumlah informan sebanyak 9 orang, terdiri dari: 1 orang Kepala Seksi Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata, 1 orang

staf bidang yang sama, 4 orang pedagang, dan 3 orang pengunjung. Jumlah ini dianggap cukup (saturasi) karena informasi yang diperoleh dari wawancara terakhir telah menunjukkan pola tematik yang berulang, tidak muncul data baru yang signifikan, dan informasi yang dikumpulkan telah cukup untuk menjawab fokus penelitian.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, serta data sekunder berupa dokumen resmi, jurnal, artikel, dan peraturan terkait seperti Keputusan Wali Kota Padang Nomor 161 Tahun 2007 dan Perda Nomor 3 Tahun 2014. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian meliputi panduan wawancara, buku catatan lapangan, kamera, dan alat perekam. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model (Matthew B Miles, A Michael Huberman, 2020), yang terdiri dari tiga tahapan: Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan yang memiliki peran berbeda (pemerintah, pedagang, dan pengunjung). Selain itu, peneliti juga menerapkan refleksivitas, yakni menyadari dan memancarkan potensi bias pribadi dalam proses pengumpulan serta interpretasi data guna menjaga objektivitas penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai tata kelola Pusat Kuliner Pantai Padang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

HASIL

Tata Kelola Pusat Kuliner Pantai Padang Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Fasilitas Publik

1. Perencanaan

   Dinas Pariwisata Kota Padang telah melaksanakan proses perencanaan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke kawasan Pusat Kuliner Pantai Padang secara cukup sistematis. Tahapan perencanaan tersebut mencakup identifikasi lokasi strategis, pemetaan jumlah dan jenis pedagang, penyediaan 36 unit kanopi, serta pelaksanaan sosialisasi dan diskusi bersama para PKL. Tujuan utama dari program ini adalah menata ulang kawasan wisata Pantai Purus agar lebih tertib, estetis, dan nyaman, sekaligus menyediakan fasilitas berdagang yang lebih terorganisasi. Hasil wawancara dengan pejabat

Dinas Pariwisata mengungkapkan bahwa pemerintah berupaya menerapkan pendekatan partisipatif. Seorang pejabat menyatakan:

"Kami ingin pedagang merasa dilibatkan dalam proses penataan ini, sehingga mereka juga memiliki rasa memiliki terhadap pusat kuliner.

Namun demikian, sebagian pedagang menyampaikan pandangan berbeda. Salah seorang PKL mengungkapkan:

"Sosialisasi memang ada, tapi kami merasa pendapat kami kurang diperhatikan. Semua keputusan sudah seperti ditentukan sebelumnya, walaupun juga telah disampaikan kepada kami"

2. Pengorganisasian

Dinas Pariwisata tidak membentuk struktur organisasi formal bagi PKL yang telah direlokasi. Keputusan ini diambil untuk menghindari potensi konflik akibat kompetisi lokasi strategis antar pedagang. Namun, ketidakhadiran struktur organisasi menyebabkan lemahnya koordinasi, absennya komunikasi dua arah, serta tidak adanya forum advokasi kepentingan pedagang.

3. Mengarahan, Menggerakkan dan Memimpin

Dalam aspek pengarahan dan penggerakan, Dinas Pariwisata Kota Padang telah mengadakan pelatihan keterampilan kepada para pedagang sebagai bentuk pelatihan usaha. Materi pelatihan meliputi manajemen usaha, pengelolaan keuangan, pengembangan produk kuliner, serta pelayanan terhadap konsumen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pedagang sehingga dapat menunjang keberhasilan Pusat Kuliner sebagai destinasi wisata yang layak dan menarik. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sebagian besar pedagang belum sepenuhnya menerapkan ilmu yang diperoleh. Seorang PKL mengungkapkan:

"Pelatihannya bagus, tapi kami susah menerapkan karena pembeli di sini masih sepi. Akhirnya banyak yang kembali jualan di luar area."

Fenomena ini menunjukkan perlunya strategi lanjutan yang tidak hanya fokus pada pelatihan, tetapi juga pada peningkatan daya tarik pusat kuliner agar ramai dikunjungi.

4. Mengendalikan

Pengendalian dalam pengelolaan pusat kuliner dilakukan melalui pemantauan lapangan oleh Dinas Pariwisata bersama Satpol PP. Namun pengawasan ini dinilai belum konsisten dan tidak dilakukan secara terstruktur. Akibatnya, masih ditemukan PKL pembohong yang berjualan di luar kawasan resmi serta kondisi pusat kuliner yang kurang terawat, seperti adanya tumpukan sampah dan tidak optimalnya fasilitas seperti toilet dan tempat duduk. Kondisi ini mencerminkan lemahnya fungsi kontrol yang seharusnya menjaga keteraturan dan kenyamanan pusat kuliner sebagai destinasi publik. Hal ini juga menimbulkan persepsi negatif dari pengunjung dan pedagang terhadap efektivitas kebijakan relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pusat Kuliner Pantai Padang Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Fasilitas Publik

1. Faktor Pendukung

a. Adanya Regulasi dan Dasar Hukum yang Mendukung

Pengelolaan Pusat Kuliner Pantai Padang memiliki legitimasi hukum yang jelas, yaitu melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014, Perda Nomor 11 Tahun 2005, serta Perwako Nomor 253 Tahun 2014. Selain itu, Keputusan Wali Kota Padang Nomor 161 Tahun 2007 juga mengatur secara khusus tentang lokasi dan pengaturan PKL di kawasan wisata Pantai Padang. Regulasi ini menjadi dasar penting dalam mendukung kebijakan penataan ruang publik dan relokasi pedagang secara resmi. Seorang pejabat Dinas Pariwisata menyampaikan dalam wawancara:

"Tanpa dasar hukum yang jelas, sulit bagi kami menata PKL. Regulasi ini yang membuat kami punya legitimasi untuk menata dan merelokasi."

b. Fasilitas yang Disediakan oleh Dinas Pariwisata

Pemerintah Kota Padang telah menyediakan berbagai fasilitas fisik seperti kanopi, karpet untuk lesehan, dan akses jalan ke lokasi pusat kuliner. Langkah ini menunjukkan adanya dukungan fasilitas awal untuk meningkatkan kenyamanan berdagang dan menarik minat pengunjung. Kepala Dinas Pariwisata, Yudi Indra Syani, juga menyampaikan bahwa tujuan dari pembangunan pusat kuliner adalah menciptakan kawasan wisata yang bersih, tertata, dan menarik secara visual.

c. Pelatihan Keterampilan dan Pengembangan Usaha bagi PKL

Dinas Pariwisata Kota Padang juga memberikan pelatihan kepada PKL sebagai bagian dari program pemberdayaan dan penguatan usaha. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan agar sejalan dengan konsep wisata kuliner yang profesional dan bersih. Pelatihan ini merupakan bentuk implementasi fungsi pengarahan dan pengembangan sumber daya manusia dalam mendukung pengelolaan pusat kuliner secara berkelanjutan. Salah satu pedagang menyatakan:

"Pelatihannya bagus, kami diajarkan cara mengatur keuangan dan menata dagangan, tapi penerapannya susah kalau pembeli jarang datang."

2. Faktor Penghambat

a. Resistensi dari Sebagian Pedagang Kaki Lima

Sebagian pedagang menolak menempati lokasi baru karena merasa bahwa lokasi pusat kuliner kurang strategis dan sedikit pengunjung. Hal ini disampaikan oleh salah satu pedagang, Yeti, dalam wawancara yang dilakukan pada 20 Januari 2025, bahwa penjualan mereka sangat menurun drastis setelah pindah ke lokasi baru. Akibatnya, banyak PKL yang memilih kembali ke lokasi semula yang dinilai lebih menguntungkan.

b. Minimnya Fasilitas yang Disediakan

Fasilitas penunjang seperti toilet umum, tempat sampah, tempat duduk pengunjung, hingga jalur pejalan kaki masih minim dan kurang layak. Kondisi ini mengurangi kenyamanan baik bagi pengunjung maupun pedagang dan menjadi salah satu alasan utama mengapa pusat kuliner tersebut kurang diminati. Bahkan berdasarkan dokumentasi peneliti ditemukan hamparan sampah yang tidak tertangani di area pusat kuliner. Seorang pengunjung mengeluhkan:

"Tempatnya bagus, tapi sayang toiletnya kotor dan sampah di mana-mana. Jadi kami malas berlama-lama di sini."

c. Tidak Adanya Kelemahan Pengawasan

Dalam aspek pengawasan juga menjadi faktor utama penghambat keberhasilan tata kelola. Minimnya kontrol dari pihak Dinas Pariwisata dan tidak adanya mekanisme evaluasi rutin membuat kondisi kawasan tidak berkembang sesuai rencana awal. Akibatnya, fungsi

pusat kuliner sebagai destinasi wisata dan ruang publik belum dapat terwujud secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengendalian dalam proses tata kelola belum berjalan sebagaimana mestinya. Salah seorang pedagang mengungkapkan:

"Petugas memang kadang datang, tapi cuma sebentar. Setelah itu ya kembali lagi seperti semula."

PEMBAHASAN

Relokasi, menurut (Eva Pertiwi et al., 2024), merupakan proses transfer lokasi, baik untuk industri maupun tempat usaha, dari satu titik ke titik lain atas dasar alasan tertentu. Dalam konteks Pusat Kuliner Pantai Padang, relokasi PKL dilakukan oleh pemerintah untuk menata kawasan wisata Pantai Purus. Namun proses ini tidak berjalan optimal karena lemahnya implementasi fungsi pengorganisasian dan pengawasan. Menurut teori fungsi manajemen oleh (Lloyd & Aho, 2020), keberhasilan suatu kebijakan publik ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan empat fungsi utama, yaitu: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing), dan pengawasan (controlling). T. Hani Handoko dalam (Syukran et al., 2022) menyatakan bahwa pengorganisasian mencakup penentuan sumber daya, perancangan struktur organisasi, pembagian tanggung jawab, dan pendelegasian yang berwenang untuk mencapai tujuan. Namun dalam praktiknya, fungsi pengorganisasian di Pusat Kuliner Pantai Padang tidak berjalan secara efektif. Tidak terbentuknya struktur organisasi pedagang menyebabkan tidak adanya sistem pembagian peran, koordinasi internal, dan forum komunikasi antara pedagang dan pemerintah. Akibatnya, muncul ketimpangan dalam penguasaan ruang dagang, konflik antar pedagang, dan lemahnya solidaritas kolektif.

Sementara itu, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata bersifat reaktif dan administratif. Pengawasan hanya dilakukan sesekali, tanpa evaluasi rutin, pelibatan masyarakat, atau mekanisme umpan balik. Hal ini bertentangan dengan prinsip pengawasan dalam manajemen yang seharusnya proaktif, sistematis, dan berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai rencana (Lloyd & Aho, 2020). Dari perspektif teori tata kelola (governance) yang dikemukakan (Kaufmann et al., 1999), pengelolaan publik yang baik harus mengedepankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, prinsip efektivitas, dan tanggung jawab. Namun, dalam praktik pengelolaan Pusat Kuliner Pantai Padang, prinsip-prinsip tersebut belum dijalankan secara konsisten. Meskipun regulasi formal telah tersedia, partisipasi pedagang hanya terjadi pada tahap sosialisasi, bukan dalam pengambilan

keputusan. Evaluasi ketiadaan dan minimnya respon terhadap kondisi aktual di lapangan (seperti fasilitas rusak atau kembalinya PKL ke lokasi awal) menunjukkan lemahnya kapasitas kelembagaan dalam menjalankan pengawasan dan pelayanan publik.

Hal ini bertolak belakang dengan temuan (Fadhila et al., 2023) tentang pemanfaatan ruang publik di Padang Panjang, yang menekankan pentingnya terbentuknya komunitas pedagang sebagai instrumen koordinasi. Faktanya, pemerintah tidak hanya menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga memfasilitasi forum komunikasi antara PKL, dinas, dan pengunjung. Hasilnya, kawasan kuliner lebih tertata dan diminati wisatawan. Begitu pula (Rizqi Ayu Maharani, 2022) dalam penelitiannya di Lombok Barat menunjukkan bahwa strategi pengelolaan yang efektif mencakup pembentukan zonasi dagang, pelibatan PKL dalam perencanaan, dan pemantauan berbasis komunitas. Sebaliknya, di Pantai Padang, tidak ada forum pedagang yang resmi, sistem zonasi longgar, dan meminimalkan pelibatan pelaku usaha dalam proses pemantauan.

Dalam (Widyawati Islami Rahayu et al., 2025) juga menggarisbawahi pentingnya signifikan bagi pedagang kaki lima, termasuk hambatan birokrasi dalam memperoleh izin, beban ekonomi akibat relokasi paksa, dan persistensi informalitas akibat penegakan kebijakan yang tidak konsisten. Dalam penelitian (Veronica & Wibawa, 2025) juga mengatakan bahwa fasilitas menjadi bagian penting dalam menjalankan suatu keberlanjutan pariwisata Selanjutnya (Julianti et al., 2017) menekankan bahwa perencanaan berbasis partisipasi penting untuk menghindari konflik dalam proses relokasi PKL. Sementara itu, perencanaan yang hanya fokus pada aspek fisik dan administratif tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat yang berisiko tinggi mengalami kegagalan. (Lloyd & Aho, 2020) juga menambahkan bahwa perencanaan yang baik harus mencakup penetapan tujuan, alternatif solusi, dan pelibatan semua pemangku kepentingan.

Temuan penelitian ini memperkuat kesimpulan bahwa tanpa struktur pengorganisasian, pemantauan kolaboratif, dan pelibatan secara nyata masyarakat, kebijakan relokasi dan pembangunan pusat kuliner hanya akan menjadi proyek administratif yang gagal mencapai tujuan. Hal ini menggarisbawahi perlunya pendekatan baru dalam pelaksanaan kebijakan, tidak hanya bergantung pada regulasi dan pelatihan semata.

Pemerintah Kota Padang perlu menerapkan strategi penguatan kelembagaan berbasis partisipasi komunitas, dengan merancang struktur organisasi lapangan yang jelas serta membangun sistem evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan. Pembentukan struktur tata

kelola mikro, seperti forum pedagang atau penunjukan koordinator lapangan yang dipilih secara partisipatif, dapat menjadi solusi untuk memperkuat pengawasan, koordinasi, dan keterlibatan para pelaku usaha di pusat kuliner. Langkah ini sejalan dengan temuan (Pramono & Hanandini, 2023) yang menyatakan bahwa keberadaan forum komunikasi pedagang mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan kuliner melalui kolaborasi antaranggota. Selain itu, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan yang sistematis juga perlu dikembangkan untuk memastikan keteraturan dan pemeliharaan fasilitas publik. Dengan strategi tersebut, Pusat Kuliner Pantai Padang diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai ruang transaksi jual beli, tetapi juga sebagai ruang sosial yang hidup, interaktif, dan berdaya saing dalam ekosistem wisata kota, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian (Mujtahid et al., 2025) bahwa sinergi antara tata kelola kelembagaan dan partisipasi komunitas menjadi kunci keberhasilan destinasi.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ketiadaan data teknis dan dokumentasi resmi dari Dinas Pariwisata terkait alasan tidak diterapkannya mekanisme pengorganisasian yang terstruktur. Hal ini menyulitkan peneliti untuk menganalisis secara komprehensif latar belakang kebijakan tersebut. Sebagaimana disarankan oleh (Muhdi et al., 2017), penelitian lanjutan perlu melakukan pendekatan studi kebijakan yang memadukan analisis dokumen resmi dan wawancara mendalam agar dapat memahami secara utuh dinamika pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah. Aspek ini dapat menjadi bahan pendalaman untuk penelitian selanjutnya, terutama dalam mengevaluasi sejauh mana penguatan kelembagaan berbasis partisipasi mampu menjawab tantangan pengelolaan pusat kuliner di kawasan wisata perkotaan.

Dari segi faktor pendukung dan penghambat tata kelola pusat kuliner Pantai Padang, tata kelola pusat kuliner ini didukung oleh keberadaan regulasi yang jelas (Perda No. 3 Tahun 2014 dan Perwako No. 253 Tahun 2014). Keberadaan regulasi yang jelas menjadi salah satu faktor utama keberhasilan tata kelola pusat kuliner. Regulasi ini tidak hanya memberikan legitimasi, tetapi juga menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari penataan ruang hingga pembinaan pedagang. Hasil penelitian (Ramdani, 2025) menunjukkan bahwa pengelolaan PKL di kawasan wisata yang memiliki payung hukum lebih tertib dibandingkan yang tanpa regulasi. Dalam konteks Pusat Kuliner Pantai Padang, keberadaan Perda dan Perwako memberikan dasar yang kuat bagi Dinas Pariwisata untuk melaksanakan relokasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan pejabat Dinas Pariwisata bahwa regulasi membuat kebijakan lebih mudah diimplementasikan di lapangan.

Penyediaan fasilitas fisik seperti kanopi, karpet lesehan, dan akses jalan turut menjadi pendukung terciptanya kawasan kuliner yang lebih tertata. Penelitian (Mahendra & Kemala, 2023) menyatakan bahwa kualitas fasilitas publik memiliki korelasi positif terhadap kenyamanan pengunjung dan daya tarik wisata. Fasilitas yang memadai mampu membentuk citra positif di mata wisatawan, sehingga meningkatkan kunjungan. Namun, di Pusat Kuliner Pantai Padang, meskipun fasilitas telah tersedia, sepinya pengunjung membuat manfaat fasilitas ini belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas perlu diimbangi dengan strategi promosi yang efektif.

Program pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata juga menjadi aspek penting dalam peningkatan kapasitas pedagang. Menurut penelitian (Najib et al., 2022), pelatihan usaha mampu meningkatkan keterampilan dan inovasi produk pelaku UMKM. Di Pusat Kuliner Pantai Padang, pelatihan yang mencakup manajemen usaha, pengelolaan keuangan, dan pelayanan konsumen diharapkan membentuk pedagang yang profesional. Namun, minimnya penerapan hasil pelatihan di lapangan menunjukkan perlunya pendampingan berkelanjutan. Tanpa keberlanjutan, pelatihan hanya menjadi pengetahuan pasif yang sulit diimplementasikan. Di sisi lain, resistensi pedagang menjadi hambatan yang cukup signifikan.. Faktor lokasi yang kurang ramai menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Maka dari itu, strategi relokasi harus mempertimbangkan potensi pasar dan arus pengunjung.

Minimnya fasilitas penunjang juga menjadi faktor penghambat yang menurunkan kenyamanan pengunjung. Menurut penelitian (Fadhila et al., 2023) fasilitas seperti toilet bersih, tempat duduk, dan area pejalan kaki sangat mempengaruhi kepuasan wisatawan. Kondisi Pusat Kuliner Pantai Padang yang masih kurang dalam hal kebersihan dan fasilitas pendukung mengurangi daya tarik kawasan. Keberadaan tumpukan sampah dan fasilitas yang kurang layak menimbulkan citra negatif. Hal ini dapat menyebabkan pengunjung enggan datang kembali.

Lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab ketidakberhasilan pusat kuliner mencapai tujuan awalnya. Penelitian (Maisyarah et al., 2018) menjelaskan bahwa pengawasan yang konsisten dan evaluasi rutin merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan fasilitas publik. Di Pusat Kuliner Pantai Padang, pengawasan yang tidak terstruktur membuat pelanggaran seperti PKL berjualan di luar area resmi tetap terjadi. Selain itu, kurangnya evaluasi membuat perbaikan fasilitas berjalan lambat. Kondisi ini menunjukkan perlunya sistem monitoring yang jelas dan terjadwal.

Berdasarkan analisis, keberhasilan Pusat Kuliner Pantai Padang sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung seperti regulasi, fasilitas, dan pelatihan memberikan pondasi yang baik bagi pengelolaan. Namun, hambatan seperti resistensi pedagang, minimnya fasilitas penunjang, dan lemahnya pengawasan menghambat optimalisasi kawasan. Penelitian (Seharja & Md, 2021)) menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan fasilitas publik memerlukan pendekatan komprehensif yang menggabungkan aspek hukum, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar pusat kuliner dapat berfungsi sebagai destinasi wisata sekaligus ruang publik yang nyaman.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Pusat Kuliner Pantai Padang oleh Dinas Pariwisata Kota Padang belum berjalan secara optimal. Kegagalan utama terjadi pada aspek pengorganisasian (organizing) dan pengawasan (controlling). Tidak adanya struktur komunitas PKL menyebabkan lemahnya koordinasi, ketiadaan forum komunikasi, serta terbatasnya partisipasi pedagang dalam menjaga dan mengembangkan kawasan kuliner. Sementara itu, pengawasan tidak dilakukan secara berkelanjutan, cenderung bersifat administratif dan tidak responsif terhadap dinamika di lapangan. Hal ini mengakibatkan pelanggaran terhadap zona perdagangan, kembalinya pedagang ke lokasi awal, serta menurunnya kualitas lingkungan pusat kuliner. Padahal dari sisi regulasi dan perencanaan, pemerintah telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Perda No. 3 Tahun 2014 dan Perwako No. 253 Tahun 2014, serta telah menyediakan fasilitas awal dan pelatihan usaha bagi pelaku usaha. Namun kelemahan dalam fungsi pengorganisasian dan pengawasan membuat efektivitas kebijakan belum tercapai secara menyeluruh. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah praktis. Pertama, perlunya pembentukan forum komunitas PKL secara resmi untuk mendorong koordinasi internal, advokasi bersama, dan kolaborasi dalam pengelolaan kawasan. Kedua, pengembangan sistem monitoring berbasis teknologi seperti dashboard pengawasan terpadu sangat penting untuk menghubungkan penggunaan fasilitas, aktivitas pengunjung, serta persepsi secara real-time. Ketiga, perlunya adanya integrasi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat melalui forum evaluasi bersama, pelibatan tokoh, dan pendampingan pascarelokasi. Keempat, pendekatan

komunikasi yang digunakan harus lebih dialogis dan partisipatif agar resistensi dapat diubah menjadi keterlibata

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian tata kelola pariwisata berbasis kuliner. Penelitian ini mengisi kekosongan studi sebelumnya dengan menyoroti secara spesifik bagaimana implementasi prinsip-prinsip tata kelola dijalankan di kawasan pusat kuliner berbasis pantai di Kota Padang. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas fokus pada aspek partisipasi masyarakat dan efektivitas kebijakan komunikasi antar aktor. Penelitian mendatang juga dapat mengadopsi pendekatan kuantitatif guna mengukur persepsi pengunjung terhadap kualitas layanan dan fasilitas yang tersedia, serta menyebarkan dampak ekonomi langsung terhadap pelaku usaha pascarelokasi. Selain itu, analisis perbandingan dengan pusat kuliner di daerah lain yang berhasil dapat menjadi acuan untuk merumuskan strategi perbaikan tata kelola yang lebih kontekstual dan berkelanjutan.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya 1) melakukan kajian lebih mendalam terkait efektivitas strategi promosi dan pengembangan daya tarik pusat kuliner pasca relokasi. 2) Menyoroti peran partisipasi aktif pedagang dan pengunjung dalam perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan agar kebijakan penataan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 3) Melakukan studi komparatif dengan pusat kuliner atau kawasan wisata kuliner di daerah lain yang berhasil dapat memberikan gambaran strategi terbaik yang dapat diadaptasi di Kota Padang. Analisis berbasis data kuantitatif terkait tren kunjungan, tingkat kepuasan pengunjung, dan dampak ekonomi bagi pedagang juga penting untuk memberikan rekomendasi yang lebih terukur. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi penyempurnaan kebijakan tata kelola pusat kuliner dan peningkatan kualitas fasilitas publik di Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, A. T., & Pangestuti, E. (2017). Peran Kuliner Dalam Meningkatkan Citra Destinasi Pariwisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, *50*(1), 153–159. https://doi.org/https://www.neliti.com/publications/186548/peran-kuliner-dalam-meningkatkan-citra-destinasi-pariwisata-taman-nasional-bromo#cite

Asaduzzaman. (2025). Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5

Eva Pertiwi, M., Agustin Nengsih, T., & Safitri, Y. (2024). Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang (Studi Kasus Di Pasar Rakyat Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, *3*(1), 112–135. https://doi.org/10.51903/jimeb.v3i1.703

Fadhila, N., Aliyah, I., & Permana, C. T. H. (2023). Pemanfaatan Ruang Publik Kawasan Kuliner sebagai Destinasi Wisata di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. *Desa-Kota*, *5*(1), 172. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/desa-kota.v5i1.69452.172-183

Julianti, F., Wisnaeni, F., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2017). *Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima kota Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang No 13 Tahun 2013 Tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*. *6*(13), 1–13. https://doi.org/http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/TINJAUAN

Kaufmann, D., Kraay, A., & Zoido-lobatón, P. (1999). Governance Matters October 1999. *World Bank Policy Research Working Paper*, *August*, 1–61. https://doi.org/Kaufmann, Daniel and Kraay, Aart and Zoido, Pablo, Governance Matters (August 1999). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=188568

Lexy J Moleong. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Lloyd, R., & Aho, W. (2020). The Four Functions of Management - An essential guide to Management Principles. *The Four Functions of Management - An Essential Guide to Management Principles*. https://doi.org/10.58809/cnfs7851

Mahendra, N. B., & Kemala, Z. (2023). Pengaruh Fasilitas Wisata dan Harga Terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan di Wana Wisata Batu Kuda Kabupaten Bandung. *Manajemen Dan Pariwisata*, *2*(1), 10–24. https://doi.org/10.32659/jmp.v2i1.251

Maisyarah, Anggraeiny, R., & Zulfiani, D. (2018). *Efektivitas Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Pengelolaan Dan Penataan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda* [Universitas Mulawarman]. ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id

Matthew B Miles, A Michael Huberman, J. S. (2020). *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)* (Helen Salmon (ed.)). SAGE Publications.

Muhdi, M., Kastawi, N. S., & Widodo, S. (2017). Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Model Manajemen Pendidikan Menengah. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, *4*(2), 135. https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p135-145

Mujtahid, Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2025). Analisis Peran Komunitas Gubuk Inspirasi Dalam Membantu Mengembangkan Kualitas Pendidikan Dan Skill Pemuda Di Desa Sumberbrantas Kota Batu. *IDENTIK: Jurnal Ekonomi, Pendidikan Dan Teknik*, *2*(4), 103–108. https://sihojurnal.com/index.php/identik/article/view/667

Najib, M. F., Februadi, A., Djarnika, T., Rafdinal, W., Lasambouw, C. M., & Nuryati, N. (2022). Inovasi Desain Kemasan (Packaging) sebagai Faktor Peningkatan Daya Saing Produk UMKM di Desa Ciwarua, Kabupaten Bandung Barat. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *6*(1), 56–64. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i1.8397

Pramono, W., & Hanandini, D. (2023). Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, *1*(1), 187. https://www.pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/36

Putu Hari Kurniawan, L. (2019). Wisata Kuliner Halal : Suatu Tinjauan Strategis Pemasaran Digital Terhadap Peningkatan Kinerja UMKM. *Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, *16*(01), 1–11. https://doi.org/https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB Terakreditasi

Ramadhan, A. A., Huda, M. M., & Suhindarno, H. (2025). Tata Kelola Pariwisata Berbasis Ecotourism (Studi Kasus Di Taman Wisata Goa Ngerong Kecamatan Rengel). *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, *9*(1), 1–16. https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jids.v9i1.5971

Ramdani, D. (2025). Analysis of the Impact of Tourist Visits on the Culture of the Community Around the Batu Kuda Tourist Area, Bandung Regency. *International Journal of Humanities, Education, and Social Sciences*, *3*(3), 851–869. https://doi.org/10.58578/ijhess.v3i3.6666

Rizqi Ayu Maharani. (2022). *Strategi Pengembanganwisata Kuliner Pantai Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Lombok Barat*. Islam Negeri Mataram Mataram.

Saeroji, A., & Wijaya, D. A. (2017). Pemetaan Wisata Kuliner Khas Kota Surakarta. *Jurnal Pariwisata Terapan*, *1*(2), 13. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jpt.24968

Said, F., Rakib, M., & Farid, R. S. (2023). *Tata Kelola Destinasi Pariwisata Bahari Sulawesi Barat*.

Seharja, S., & Md, A. (2021). *Strategi Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Pantai Pasir Panjang Di Kabupaten Kerinci Berbasis Aspek 3A (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas) Program Studi Usaha Perjalanan Wisata Fakultas Pariwisata Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat 2021*.

Spillane, J., Supovitz, J., & D'Auria, J. (2019). Meaningful & sustainable school improvement with distributed leadership. *CPRE Research Reports*, 112–177. https://doi.org/https://eric.ed.gov/?id=ED597840

Sugiyono. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sulaiman, A. I., Pangestuti, S., Sugito, T., & Sabiq, A. (2022). Community Empowerment in Culinary Tourism as Sustainable Rural Development. *Sustainable Development Research*, *4*(1), p1. https://doi.org/https://doi.org/10.30560/sdr.v4n1p1

Syukran, M., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2022). Konsep Organisasi Dan Pengorganisasian Dalam Perwujudan Kepentingan Manusia. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, *9*(1), 95–103. https://doi.org/10.37606/publik.v9i1.277

Veronica, V., & Wibawa, C. (2025). Strategi Optimalisasi Kuliner Lokal Dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Di Jakarta. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, *9*(1), 29–43. https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jids.v9i1.5988

Widyawati Islami Rahayu, N., Sawir, M., Melawati, F., & Mu'is, A. (2025). The public space Paradox: Balancing governance and street vending in urban Indonesia. *Social Sciences and Humanities Open*, *11*(April), 101559. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101559

Wilopo, K., & Hakim, L. (2017). Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya (Studi Kasus pada Kawasan Situs Trowulan sebagai Pariwisata Budaya Unggulan di Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, *41*(1), 56–65. administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id.